

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Studi Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tegalgondo Kabupaten Malang)

Hellanda Widiyanti¹, Nurul Umi Ati², Hayat³

^{1,2,3} Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

E-mail: hellandawidiyanti@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan salah satu contoh instansi pemerintahan desa yang melaksanakan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Banyaknya masyarakat miskin pada desa tersebut menyebabkan pemerintah desa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat pada Desa Tegalgondo Kabupaten Malang, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu deskriptif kualitatif dan untuk pengumpulan data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan KPM tersebut telah berjalan dengan efektif. Hal tersebut terlihat dari banyaknya KPM yang mengalami peningkatan taraf hidup, graduasi kepesertaan, mampu untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan kemudahan untuk mengakses fasilitas pelayanan publik terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Adanya komitmen kuat dari Pemerintah Desa dalam mengubah pola pikir KPM untuk berkembang. Selain itu, adanya peran aktif KPM untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan mengikuti pelatihan, dan pendamping yang bersentuhan langsung memudahkan untuk mengetahui perkembangan KPM. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu keterlambatan pencairan dana dari jadwal yang telah ditentukan dan tidak cairnya dana PKH bagi peserta aktif dikarenakan tidak sinkronnya data. Dalam hal ini diperlukan adanya peningkatan pelatihan SDM, dorongan perubahan pola pikir KPM, dan melakukan update data KPM setiap tahunnya.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan Publik, PKH, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

The Tegalgondo Village Government, Karangploso District, Malang Regency is one example of a village government agency that implements the Family Hope Program in improving the welfare of the poor. The number of poor people in the village causes the village government to try to improve the welfare of its people. This study aims to determine the implementation of the Family Hope Program in improving the welfare of the Beneficiary Families in Tegalgondo Village, Malang Regency, knowing the supporting and inhibiting factors in improving the welfare of the Beneficiary Families. The research method used in this study is descriptive qualitative and for data collection is done through data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of PKH in improving the welfare of the KPM has been running effectively. This can be seen from the number of KPMs who experience an increase in their standard of living, graduation of membership, being able to take education to a higher level, and ease of accessing public

service facilities, especially in the fields of education and health. There is a strong commitment from the Village Government in changing the mindset of KPM to develop. In addition, the existence of an active role for KPM to improve their abilities by participating in training, and assistants who are in direct contact make it easier to know the development of KPM. However, in its implementation there are obstacles, namely delays in disbursing funds from a predetermined schedule and non-disbursement of PKH funds for active participants due to data out of sync. In this case, it is necessary to increase HR training, encourage changes in KPM mindset, and update KPM data every year.

Keywords : *Evaluation of Public Policy, PKH, Community Welfare*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai hal termasuk kurangnya akses, pendapatan, pengeluaran subsisten, kerentanan penyakit, hutang dan piutang serta dalam beberapa kasus tertentu orang menjual barang-barang berharga mereka untuk membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidup (Putri dkk, 2021: 33).

Kemiskinan merupakan sebuah masalah utama yang sulit untuk diberantas dan memerlukan penanganan khusus agar dapat ditangani dengan baik, serta menjadi urusan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 kemiskinan didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya hak-hak dasar untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sebagai akibat dari kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tingkat kemiskinan di Indonesia sendiri mengalami penurunan sebesar 0,1% menjadi 27,54 juta pada Maret 2021. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur meningkat menjadi 11,4% pada Maret 2021. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang sendiri berdasarkan dengan hasil yang diperoleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang signifikan yang mana mencapai 276.580 jiwa pada tahun 2021.

Dimana untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini sendiri, perlu dilakukan berbagai cara untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menekan angka kemiskinan. Salah satunya yaitu dengan pemerintah menciptakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan yang diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut diharapkan dapat menangani kemiskinan ini dan tidak ada kesenjangan di masyarakat (Umi Kalsum dkk, 2019: 70). Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial telah menetapkan sebuah program bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial, selaku instansi Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang sosial. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan atau siapa saja yang telah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai KELUARGA PENERIMA MANFAAT, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018. Kebijakan ini telah dibentuk pada tanggal 21 September 2007 dengan Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tentang "Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan".

Kabupaten Malang merupakan salah satu tempat yang melaksanakan PKH. Kabupaten Malang ini berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan (Sebelah Utara), Kabupaten Probolinggo dan Lumajang (Sebelah Timur), Samudra Indonesia (Sebelah Selatan), dan Kabupaten Blitar dan Kediri (Sebelah Barat). Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 kecamatan yang meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Kecamatan Karangploso yang terdiri dari 9 desa. Salah satu Desa di Kecamatan Karangploso adalah Desa Tegalgondo.

Desa Tegalgondo merupakan salah satu Desa yang mempunyai jumlah miskin yang cukup banyak. Dengan dilaksanakannya PKH pada Desa Tegalgondo ini diharapkan dapat

memper memudahkan masyarakat miskin dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan dengan baik. Berdasarkan dengan hasil observasi penulis di lapangan diperoleh permasalahan-permasalahan ketika program keluarga harapan dilaksanakan. Dimana permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: pertama, banyak masyarakat yang tidak memahami tujuan dari dibentuknya program tersebut, sehingga banyak KPM menyalahgunakan dana yang telah diberikan. Kedua, distribusi yang tidak merata dimana orang yang dianggap mampu tetap menerima PKH, tetapi mereka yang berasal dari keluarga miskin yang sangat membutuhkan tidak menerima manfaat program tersebut. Ketiga, program keluarga harapan tidak efektif dalam membantu kesejahteraan keluarga penerima manfaat, karena KPM memiliki taraf hidup yang tetap.

Penelitian serupa dilakukan oleh Rifqi Fauzan (2019) bahwa pelaksanaan PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup efektif, karena hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan taraf hidup KPM yang mana menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, kemudahan akses sangat membantu pihak desa dalam membantu mendistribusikan bantuan secara merata. Walaupun program tersebut masih terbelang tidak dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Fauzan (2019) adalah dalam penelitiannya menggunakan teknik evaluasi context, input, process, dan product untuk mengetahui seberapa efisien program tersebut. Selain itu, perbedaan lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan dan yang penulis lakukan lebih kepada evaluasi pelaksanaan PKH yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang terjadi pada Desa Tegalondo Kabupaten Malang.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tegalondo Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan mengenai apa yang terjadi sesuai dengan topic penelitian. Penelitian ini dilakukan pada salah satu instansi Pemerintahan Desa yaitu Kantor Kepala Desa Tegalondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Peneliti memilih tempat ini karena terdapat permasalahan akan tetapnya tingkat kesejahteraan KPM. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pra penelitian yang telah dilakukan.

Untuk memperoleh data dari responden peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data/informasi yang akurat. Sedangkan untuk analisis data, peneliti menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang mana terdapat 3 tahapan yang dilakukan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tegalondo dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat

1. Identifikasi Tujuan Program

KPM pada Desa Tegalondo ini telah memahami bahwa tujuan dari dikeluarkannya program bansos PKH tersebut dengan baik, yang mana diperuntukkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Serta mendorong masyarakat miskin untuk dapat mengubah pola pikir KPM dan kemandirian mereka untuk dapat meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dalam pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dapat membantu KPM untuk mengirim anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan sekolah seperti halnya buku, sepatu, pensil dan lain sebagainya. Untuk fasilitas kesehatan sendiri lebih diperuntukkan bagi KPM yang memiliki balita agar dapat memberikan asupan gizi dan imunisasi yang maksimal dan bagi ibu hamil/nifas agar dapat

dengan mudah memeriksakan kandungan mereka secara rutin tanpa adanya pemungutan biaya. Sedangkan untuk kesejahteraan sosial ini sendiri lebih diperuntukkan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya pengetahuan KPM Desa Tegalondo akan tujuan program tersebut, dapat membantu mereka dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan publik dengan mudah tanpa adanya pengeluaran biaya konsumsi yang banyak.

2. Analisis Masalah

Analisis masalah yang dilakukan oleh koordinator pendamping PKH Desa Tegalondo dengan ketua kelompok belum bisa dikatakan maksimal dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh KPM. Dimana terdapat problematika yang tidak ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Dalam pelaksanaan kegiatan analisis masalah tersebut dilakukan oleh koordinator pendamping dengan ketua kelompok dengan cara melakukan kegiatan diskusi dan saling bertukar pikiran sehingga menemukan jalan tengah dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh KPM. Permasalahan yang sering kali dikeluhkan oleh KPM ke pendamping yaitu mengenai perekonomian. Akan tetapi, dalam melakukan analisis masalah pelaksanaan PKH tersebut, pendamping dan ketua terkadang tidak dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh KPM. Dengan adanya analisis permasalahan yang dilakukan oleh Koordinator pendamping dan ketua kelompok PKH Desa Tegalondo ini dapat membantu KPM yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan mereka.

3. Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan

Dalam hal ini untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Desa Tegalondo telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Seperti dilakukannya perencanaan awal (pendaftaran dan penentuan penerima program, sosialisasi program hingga dilakukannya graduasi/ transformasi kepesertaan. Untuk pelaksanaan PKH pada Desa Tegalondo ini untuk pendaftaran dilakukan oleh Pihak Desa yang mana data penerima bantuan dikirim ke DTKS (Data Terpadu Keluarga Sejahtera) yang mana nantinya akan diseleksi. tahapan selanjutnya sosialisasi program kepada penerima, hingga tahapan paling terakhir yaitu graduasi/transormasi kepesertaan merupakan kegiatan untuk menonaktifkan KELUARGA PENERIMA MANFAAT yang tergolong sudah mengalami peningkatan taraf hidup. terakhir yaitu graduasi/transormasi kepesertaan merupakan kegiatan untuk menonaktifkan KELUARGA PENERIMA MANFAAT yang tergolong sudah mengalami peningkatan taraf hidup.

4. Pengukuran Perubahan

Perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya program PKH yaitu KPM mengalami peningkatan kesejahteraan yang menjadi lebih baik. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya jumlah penerima program PKH yang signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat KPM yang mengalami graduasi. Graduasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat ketika KPM tersebut telah mengalami peningkatan kesejahteraan, sehingga pemerintah berpikir bahwa KPM telah mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perubahan yang terjadi pada KPM tersebut juga dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Namun, dalam pelaksanaannya ini sendiri tidak melulu berhasil. Dalam pelaksanaan PKH pada Desa Tegalondo ini terdapat KPM yang tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. KPM memiliki taraf hidup cenderung tetap tanpa adanya perubahan. Hal ini dikarenakan tidak berubahnya pola pikir KPM serta kemandirian dalam mendorong diri sendiri untuk dapat berkembang. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan KPM yang disebabkan oleh program bansos PKH ini dapat membantu dan memudahkan KPM dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga dapat meminimalisir pengeluaran.

5. Menentukan Perubahan

Terjadinya perubahan pada KPM Desa Tegalondo dapat terlihat sejak dilaksanakannya program bantuan PKH tersebut dilaksanakan. Dimana KPM mengalami peningkatan secara perlahan baik dalam hal pendidikan maupun kesejahteraan sosial. Perubahan lain

yang dirasakan yaitu terjadinya peningkatan pendapatan Dimana KPM mulai mendorong kemandirian diri dan mengubah pola pikir dengan membuka usaha agar dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya peningkatan pendapatan ini KPM dapat membangun rumah mereka seperti membangun kamar mandi, perbaikan atap rumah, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa mayoritas perubahan yang dialami oleh KPM di Desa Tegalondo tersebut terjadi karena dikeluarkannya program bansos PKH. PKH ini memberikan perubahan yang signifikan bagi KPM terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya PKH ini dapat membantu KPM dalam meningkatkan pendapatan sehingga terpenuhi kebutuhan primer dengan mudah.

6. Menentukan Dampak yang Dihasilkan

Untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini sendiri pada Desa Tegalondo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat ternyata memberikan sebuah dampak yang positif dan cukup signifikan dalam merubah mindset Keluarga Penerima Manfaat. Dampak yang dihasilkan lebih condong kearah yang positif, seperti memberikan kemudahan bagi Keluarga Penerima Manfaat untuk dapat menggunakan fasilitas pelayanan publik terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini Keluarga Penerima Manfaat merasa sangat terjangkau untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik dan lebih tinggi. Selain itu, dampak lain yang dirasakan yaitu pengeluaran akan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan menjadi sedikit. Dampak lain yang dirasakan yaitu terjadinya perubahan akan tingkat kesejahteraan, yang mana menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, ada juga dampak negative yang dirasakan yaitu masyarakat terkadang merasa malas untuk datang/ mengikuti kegiatan perkumpulan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Desa Tegalondo sendiri maupun pendamping

Faktor Pendorong Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pda Desa Tegalondo Kabupaten Malang

1. Adanya Komitmen yang Kuat dari Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Tegalondo disini sangat berperan aktif untuk dapat mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. Hal tersebut didukung oleh pemerintah desa dengan melihat kondisi Keluarga Penerima Manfaat setelah dan sebelum mendapatkan bantuan. Apakah Keluarga Penerima Manfaat memiliki tingkat kesejahteraan yang meningkat atau bahkan cenderung tetap. Selain itu, pemerintah desa juga selalu memberikan masukan serta support kepada Keluarga Penerima Manfaat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

2. Peserta yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Dalam membantu keberhasilan program tersebut Keluarga Penerima Manfaat Desa Tegalondo berperan aktif dengan cara menghadiri setiap kegiatan yang diadakan oleh pihak desa dan pendamping Program Keluarga Harapan. Untuk kegiatan yang diadakan oleh pihak Desa Tegalondo biasanya seperti pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan limbah sampah rumah tangga seperti halnya plastic, kardus bekas, botol bekas dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong Keluarga Penerima Manfaat Desa Tegalondo untuk mengubah mindset mereka agar menjadi lebih berkembang dan memiliki kreativitas untuk dapat digunakan sebagai bekal dalam membuka usaha.

3. Pendamping yang Bersentuhan Langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat

Dalam keberlangsungan Program Keluarga Harapan tersebut pendamping bersentuhan langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat. Biasanya pendamping melakukan kegiatan perkumpulan yang dilakukan dengan Keluarga Penerima Manfaat Desa Tegalondo yang disebut dengan Peningkatan Pertemuan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diadakan setiap sebulan sekali. Tidak hanya itu saja, untuk lebih mudah memberikan informasi mengenai Program Keluarga Harapan ini pendamping juga menggunakan whatsapp yang mana dirasa lebih mudah untuk berinteraksi dengan Keluarga Penerima Manfaat setiap

saat. Selain itu, pendamping juga memberikan motivasi, saran, dorongan kepada Keluarga Penerima Manfaat agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pda Desa Tegalondo Kabupaten Malang

1. Ketidaksesuaian Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana Program Keluarga Harapan ini biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali yaitu bulan April, Juli, dan Oktober. Namun, pada kenyataannya pencairan dana pada tahap 3 tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang mana seharusnya dibagikan pada bulan Oktober mengalami keterlambatan sehingga baru dicairkan pada bulan Desember. Keterlambatan pencairan dana bansos di Desa Tegalondo ini tidak terjadi sekali atau dua kali, hal ini sering sekali terjadi dan dirasakan sangat mengganggu bagi Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki beban/ tanggungan seperti biaya pendidikan.

2. Tidak Cairnya Dana bagi Peserta Aktif

Hal seperti ini dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat Desa Tegalondo yang mana terdapat beberapa peserta aktif yang dana PKH mereka tidak cair padahal masih berstatus aktif. Untuk Program Keluarga Harapan ini Kelaurga Penerima Manfaat mendapatkan 2 bantuan sekaligus yaitu berupa uang tunai dan sembako. Ada juga Keluarga Penerima Manfaat yang tidak cair dana sembakonya padahal masih berstatus aktif, dan ada juga Keluarga Penerima Manfaat yang tahapan 1 atau tahapan 2 dana Program Keluarga Harapan tidak cair.

SIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis temukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan PKH di Desa Tegalondo tersebut telah berjalan dengan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan KPM. Hal tersebut dapat dibuktikan dari banyaknya KPM yang telah di graduasi, kemudahan akses bagi KPM untuk merasakan pendidikan yang baik, dan banyaknya KPM yang telah menyekolahkan anaknya hingga jenjang yang lebih tinggi.

Keberhasilan pelaksanaan PKH tersebut didukung juga oleh beberapa faktor seperti peran aktif Pemerintah Desa dengan memantau perkembangan KPM setelah mendapatkan bantuan. Adapula peran aktif KPM dengan mengikuti kegiatan pelatihan SDM. Serta pendamping yang bersentuhan langsung dengan KPM memberikan kemudahan bagi pendamping untuk mengetahui keadaan dan permasalahan yang dialami KPM.

Namun, dalam pelaksanaan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadi kendala dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan PKH di Desa Tegalondo ini sendiri mengalami kendala berupa keterlambatan pencairan dana yang tidak diketahui faktor penyebab utamanya dan tidak cairnya dana bagi peserta aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 2019-2021. Retrieved from <https://malangkab.bps.go.id/indicator/23/81/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2021). Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur September 2020 mencapai 11,46 persen. Retrieved from <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1229/persentase-penduduk-miskin-di-jawa-timur-september-2020-mencapai-11-46-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS) <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-danketimpangan.html>. Diakses pada Minggu 24 Oktober 2021
- Hayat. (2018). Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi).Edisi Pertama. Malang: Intrans Publishing. hlm.12.
- Hayat. (2016). Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.20, No.2, hlm.176

- Hayat. (2019). Hukum dan Kebijakan Publik. Bandung: PT. Refika Aditama.hlm. 40
- Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hayat, SH Turohman, dan Y.Cikusin. (2018). Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemerintah, Vol.8, No.2, hlm.150.
- Hidayat AS, Afifuddin, Hayat. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.Journal Inovasi Penelitian, Vol.2, No.5. hlm.33
- Juliana. (2018). ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN (STUDI KASUS: KELURAHAN BAGIAN DELI SEBERANG, KECAMATAN MEDAN BELAWAN, KOTA MEDAN). hlm. 21.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007
- Moloeng. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Putri EA, Slamet Muchsin, dan Hayat. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak di Era Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kapupaten Tanah Bumbu).Jurnal Respon Publik, Vo.15, No.7, hlm.33.
- RF Dwi Cahya. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Repository IPDN , hlm.19.
- Umi Kalsum, Nurul Umi Ati, dan Hayat. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kebijakan UU No.10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Ampelgading Tamansari 60 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang). Jurnal Vol. 13, No.6, hlm. 70.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
- Winarno Surachmad. (2002). Evaluasi Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. hlm.206